



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BERRY ARIFSYAH HARAHAP
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 245774

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.470.000.000**

1. Tanah Seluas 347 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA ,
HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
2. Tanah Seluas 582 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 447 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 719 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 210.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/150 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
6. Tanah Seluas 274 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
1.300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/29 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
8. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 560.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 380.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 19.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.037.959.223
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.087.459.223
III. HUTANG	Rp.	986.397.907
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.101.061.316

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.